



Pengadilan Tinggi Agama  
Surabaya

PULIH  
LEBIH CEPAT  
BANGKIT  
LEBIH KUAT

REPUBLIC OF  
INDONESIA  
17 Agustus 2022



G20  
INDONESIA  
2022

# 2022

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

☎ (031) 5681797

✉ ptasurabaya@gmail.com

🌐 www.ptasurabaya.go.id



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

NOMOR : W13-A/5687/OT.00 /SK/11/2022

**Tentang**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. Bahwa untuk Menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - 3. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 1 November 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



D. H. Baruddin Muhammad, S.H., M.H.

NIP. 19570502 198103 1 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
 NOMOR : W13-A/5687/OT.00 /SK/11/2022  
 TANGGAL : 1 November 2022

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sema nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengdailan TK Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> <li>• Trend polaritas Positif (+)</li> <li>• Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan setiap bulan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p style="text-align: center;"> <b>Jumlah Perkara yang Tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span>  <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <b>Jumlah Perkara yang diselesaikan</b> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi</li> <li>• Trend polaritas Positif (+)</li> <li>• Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan setiap bulan</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>c. Index Persepsi stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Index Persepsi Kepuasan stakeholder</b></p> </div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Target responden ditetapkan menggunakan tabel sampel dan populasi dari Krejcie and morgan sesuai lampiran II Permenpan</li> </ul>	<p>Panitera dan Sekretaris</p>	<p>Laporan triwulan</p>

			<p>RB nomor 14 Tahun 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> <li>• Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> <li>• Trend polaritas Positif (+)</li> <li>• Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan pertriwulan</li> </ul>		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> <li>• Trend polaritas Positif (+)</li> <li>• Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan setiap bulan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan







# PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNKONO NO.7 TELP.(031) 5681797 FAX.(031)5680426

EMAIL : [ptasurabaya@gmail.com](mailto:ptasurabaya@gmail.com) SURABAYA 60225

## DAFTAR HADIR PTA

<b>Kode Dokumen</b> FM/AM/04/01	<b>Tgl. Pembuatan</b> 01/03/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 09/10/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 09/10/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**Jenis Kegiatan** : (Rapat, ~~Pelatihan, Briefing, Lain-Lain~~)\*  
**Nama Kegiatan** : Rapat Reviu IKU  
**Hari, Tgl.** : Selasa, 18 Oktober 2022  
**Waktu** : 13.30 WIB s.d. selesai  
**Tempat** : Ruang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Jl. Mayjend Sungkono No. 07, Surabaya

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.	Ketua	1.
2.	Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.	Wakil Ketua	2.
3.	Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.	Panitera	3.
4.	Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.	Sekretaris	4.
5.	H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	5.
6.	Rusmin Rapi, S.T., S.H., M.H.	Kabag. Umum dan Keuangan	6.
7.	Benny Hardiyanto, S.H.	Kasubbag. Renprog	7.
8.	Lukmanul Hakim, S.E., S.H.	Kasubbag. Kepegawaian dan TI	8.
9.	Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H.	Kasubbag. TURT	9.
10.	Nurman Saputra, S.H., M.M., M.H.	Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan	10.
11.	Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.	Panmud. Banding	11.
12.	Dra. Hj. Suffana Qomah	Panmud. Hukum	12.

Keterangan : \*) coret yang tidak perlu



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426

EMAIL: [ptasurabaya@gmail.com](mailto:ptasurabaya@gmail.com) SURABAYA 60225

## NOTULEN RAPAT

**Kode Dokumen**  
FM/AM/04/02

**Tgl. Pembuatan**  
01/03/2018

**Tgl. Revisi**  
09/10/2018

**Tgl. Efektif**  
09/10/2018

Hari/Tanggal	Selasa, 18 Oktober 2022
Jam	13.30 WIB s/d selesai
Tempat	Ruang Ketua
Pimpinan Rapat	Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
Peserta Rapat	Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Panitera Muda

### Agenda Rapat

1. Reviu Indikator Kinerja Utama
2. Reviu Target Indikator Kinerja Utama

#### 1. Pembukaan

- Rapat dibuka oleh Sekretaris selaku Moderator, Bapak H. Agus Widyo Susanto, S.H., M.H. pada pukul 13.30 WIB diawali dengan membaca basmallah
- Penyampaian Agenda Rapat :
  - a. Pembahasan mengenai Reviu Indikator Kinerja Utama untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingka Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
  - b. Pembahasan mengenai Reviu Target Indikator Kinerja Utama terkait dengan keadaan/realisasi perkara berdasarkan laporan perkara berjalan.

#### 2. Pengarahan dari Ketua

Adapun arahan yang disampaikan oleh Ketua, Bapak Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., antara lain :

- Reviu Indikator Kinerja utama ini perlu dilakukan untuk mensinkronkan antara IKU Mahkamah Agung dengan IKU Peradilan dibawahnya.
- Harus dicermati perubahan dan perbedaan Indikator Kinerja Utama yang lama dengan SK Sekretaris nomor 173/SEK/SK/I/2022.
- Terkait dengan perubahan target IKU dikaitkan dengan realisasi data perkara, dapat dilakukan reviu mengenai target tersebut dengan memberikan/memaparkan terlebih dahulu mengenai data perkara yang berjalan sampai dengan tanggal hari ini.

#### 3. Pemaparan

Berikut pemaparan yang disampaikan Panitera, Sekretaris, dan kepala bagian :

a. Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

- Ada Indikator Kinerja Utama sebelumnya yang ditiadakan dengan adanya penetapan SK Sekretaris Mahkamah Agung nomor 173/SEK/SK/I/2022 Indikator tersebut adalah :



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426

EMAIL: [ptasurabaya@gmail.com](mailto:ptasurabaya@gmail.com) SURABAYA 60225

## NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/02	01/03/2018	09/10/2018	09/10/2018

1. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan
  2. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
    - Untuk Indikator Kinerja Utama Lainnya pada dasarnya tetap hanya saja redaksi di beberapa indicator ada sedikit perbedaan tetapi tidak mengubah maksud dari indicator tersebut.
    - Selain dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekma tersebut ada Indikator Kinerja Utama tambahan yang perlu juga direviu terkait dengan kebijakan dari Ditjen Badilag berdasarkan surat nomor 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal pelaksanaan Kegiatan Asesmen APM Tahun 2022 yang intinya Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi.
    - Surat Dirjen Badilag ini mengakibatkan Indikator Tambahan "Persentase Peradilan Agama yang dilakukan *surveillance* APM dengan nilai *A excellent*" diperlukan lagi sehingga perlu dihapus.
    - Mencermati perkembangan laporan keadaan perkara ada satu indikator kinerja utama yang diperkirakan akan sulit tercapai targetnya. Indikator Kinerja Utama tersebut yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 73%. Diperkirakan pada akhir tahun tidak akan mencapai target tersebut dikarenakan adanya peningkatan pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum kasasi. Sehingga target perlu untuk di turunkan dengan perkiraan diakhir tahun capaian indicator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 63%
  - b. H. Agus Widyono Susanto, S.H., M.H.
    - Memang ada 2 Indikator Kinerja Utama yang dihapus berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung seperti yang disampaikan oleh Ibu Panitera. Dan untuk itu perlu di tetapkan Kembali IKU Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
    - Untuk Indikator kinerja Utama Tambahan akan direviu pada Renstra khususnya pada Matrik Renstra 2020 – 2024;
    - Perubahan Target Indikator Kinerja Utama khususnya mengenai Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi akan dituangkan dalam perubahan pada Renstra, PK dan RKT untuk menyesuaikan dokumen SAKIP yang telah ada.
  - c. H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.
    - Reviu yang telah dibahas ini telah kami catat dan akan kami tindaklanjuti dengan penyesuaian dokumen-dokumen yang diperlukan khususnya terkait dengan reviu indikator kinerja utama, Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan
- 4. Penutup**
- Rapat ini ditutup oleh Sekretaris pada pukul 15.30 WIB dengan mengucapkan hamdallah



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426

EMAIL: [ptasurabaya@gmail.com](mailto:ptasurabaya@gmail.com) SURABAYA 60225

## DOKUMENTASI RAPAT

<b>Kode Dokumen</b> FM/AM/04/02	<b>Tgl. Pembuatan</b> 01/03/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 09/10/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 09/10/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	Reviu IKU Tahun 2022	Bagian perencanaan untuk Menyusun Dokumen Reviu IKU	1-11-2022	Kabag Perencanaan dan Kasubbag Renprog	(closed)
2.	Reviu Renstra 2020-2024	Bagian Perencanaan untuk Menyusun dokumen Reviu Renstra 2020-2024	1-11-2022	Kabag Perencanaan dan Kasubbag Renprog	(closed)
3.	Reviu RKT dan PK 2022	Bagian perencanaan untuk Menyusun Reviu PK dan RKT	1-11-2022	Sekretaris	(Closed)

Dibuat oleh,

  
Benny Hardiyanto, S.H.  
NIP.197611222009121002



Surabaya, 18 Oktober 2022

Diketahui oleh,

  
Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.  
NIP. 195705021981031006

## Dokumentasi Rapat Reviu IKU

